

**IMPLEMENTASI SATUAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN
INDEKS INOVASI DAERAH
(Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025)**

(Skripsi)

**Oleh
NI LUH MEY WEDAYANI
NPM 2216021111**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SATUAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN INDEKS INOVASI DAERAH (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025)

**Oleh
NI LUH MEY WEDAYANI**

Implementasi kebijakan inovasi daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemerintah Provinsi Lampung melalui Balitbangda membentuk Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk mengoordinasikan dan mendorong inovasi perangkat daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti petunjuk teknis yang berubah, inovasi daerah belum memiliki bukti dukung lengkap, komitmen pimpinan daerah yang belum optimal, seringnya pergantian operator IID, dan masih ada perangkat daerah yang tidak menginput data inovasi daerah yang berdampak pada capaian IID. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SID dalam peningkatan IID di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SID belum terlaksana karena mengalami penurunan predikat IID akibat lemahnya sikap dan komitmen pimpinan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sudah terlaksana. Namun pada indikator disposisi belum terlaksana disebabkan oleh komitmen pimpinan daerah yang belum optimal. Maka dari itu, disarankan peningkatan pada indikator disposisi melalui penguatan komitmen dan sikap pimpinan daerah terhadap inovasi daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Satuan Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION UNITS IN IMPROVING THE REGIONAL INNOVATION INDEX (A Study at the Regional Research and Development Agency of Lampung Province in 2025)

**By
NI LUH MEY WEDAYANI**

The implementation of regional innovation policy is an important instrument for improving local government performance as measured by the Regional Innovation Index (IID). The Government of Lampung Province, through the Regional Research and Development Agency (Balitbangda), established the Regional Innovation Unit (SID) to coordinate and promote innovation among local government agencies. However, its implementation continues to face various challenges, including changes in technical guidelines, incomplete supporting evidence for regional innovations, suboptimal commitment from regional leadership, frequent turnover of IID operators, and the failure of some local government agencies to input regional innovation data, which has affected the achievement of the IID. This study aims to analyze the implementation of the SID in improving the IID at the Regional Research and Development Agency of Lampung Province in 2025. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. Data analysis refers to George C. Edwards III's policy implementation model, which includes the indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the SID has not been effectively carried out, as reflected by the decline in the IID rating resulting from weak attitudes and commitment of regional leadership. This study concludes that the indicators of communication, resources, and bureaucratic structure have been implemented. However, the disposition indicator has not been implemented due to the suboptimal commitment of regional leadership. Therefore, it is recommended to strengthen the disposition indicator through enhancing the commitment and leadership attitudes of regional leaders toward regional innovation.

Keywords: Policy Implementation, Regional Innovation Unit, Regional Innovation Index.

**IMPLEMENTASI SATUAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN
INDEKS INOVASI DAERAH
(Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025)**

Oleh

NI LUH MEY WEDAYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI SATUAN
INOVASI DAERAH DALAM
PENINGKATAN INDEKS
INOVASI DAERAH (Studi Di
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025)**

Nama Mahasiswa

: Ni Luh Mey Wedayani

Nomor Pokok Mahasiswa

2216021111

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Andri Marta, S.I.P., M.I.P.
NIP. 199003042019031008

Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.
NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Andri Marta, S.I.P., M.I.P.



Sekretaris

: Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.



Penguji Utama

: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Ni Luh Mey Wedayani
NPM 2216021111

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di sumbernadi, pada tanggal 11 Mei 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, Bapak I Wayan Benny Supelesi dan Ibu Ni Putu Sandiyati. Pendidikan penulis dimulai di PAUD Andriyani yang diselesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya, Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Sumbarnadi dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 ketapang hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Ketapang dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung pada program pendidikan strata satu (S1). Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di kampung Bumiratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2025. Penulis juga melaksanakan MBKM Magang selama 6 bulan di Badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung (Balitbangda). Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam menjalani pendidikan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Penulis merupakan anggota bidang organisasi dan kaderisasi UKM Hindu Universitas Lampung.

MOTTO

”Ilmu pengetahuan merupakan sarana utama bagi manusia untuk memahami kebenaran, menuntun pikiran, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang menyimpang dari dharma.”

(Sarasamusccaya 27)

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्मयः ।
स बुद्धिर्ान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ 18॥

karmanyakarma yaḥ paśhyed
akarmaṇi cha karma yaḥ
sa buddhimān manuṣhyeṣhu
sa yuktaḥ kṛitsna-karma-kṛit

Artinya:

“Mereka yang melihat tindakan dalam ketidakaktifan dan ketidakaktifan dalam tindakan adalah orang-orang yang benar-benar bijaksana diantara manusia.”

(Bhagavad Gita 4.18)

Tat Tvam Asi

“Engkau adalah Dia”

(Chāndogya Upaniṣad, VI.8.7.)

“Dalam diam ada ketenangan, Dalam sabar ada kekuatan.”

(Ni Luh Mey Wedayani)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa* atas limpahan nikmat dan *Asungkerta Waranugraha-Nya*

Dengan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya ini untuk
orang tuaku yang sangat kusayangi.

Terima kasih atas segala pengorbanan, kepercayaan, dan cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku. Tanpa doa yang kalian lantunkan setiap harinya, maka aku tidak akan sampai pada titik ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen, staff, dan teman-teman seperjuangan di jurusan ilmu pemerintahan.

Almamaterku tercinta
Universitas lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, karena atas sungkerta waranugraha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Satuan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025)"** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. Selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan.
4. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP. Selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P. dan ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku dosen penguji.
7. Seluruh dosen dan staff jurusan ilmu pemerintahan universitas lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan serta arahan dan bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.

8. Kepada Mamaku Ni Putu Sandiyati, Ayahku Fredi Chandra Irawan, Bapakku I Wayan Benny Supelesi, Ibuku Putu Sumiati, yang aku sayangi terima kasih sudah mendewasakan penulis dengan cinta dan kasih sayang yang teramat tulus. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian.
9. Kepada adik-adikku Kadek Keyca Wijayastri dan Risky Sandi Irawan terima kasih sudah menjadi adik yang penuh pengertian dan menyayangi penulis dengan tulus.
10. Kepada Dadong Sandi, Kakek I Nyoman Luga, Mbah Ni Gusti Putu Sulastri, Kakek I Nyoman Sukra terima kasih atas segala dukungan dan doa tulus kalian.
11. Kepada Om I Made Suwamba, Tante Ni Made Dwi Desmawaty, Adek I Gede Kresna Novantara Aditama, Adek Ni Kadek kyomi Sarayu Lokha, Adek I Komang Jiva Bajra Jayantara, terima kasih sudah menjadi rumah ternyaman untuk penulis pulang, doa serta dukungan kalian lah yang membuat penulis bisa sampai pada pencapaian ini.
12. Kepada Om I Made Arix Krestari terima kasih sudah menyayangi penulis.
13. Kepada adik sepupuku Kadek Amrita Padma Ningrum, Terima kasih telah menemani keseharian penulis.
14. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih karena telah menjadi keluarga besar yang menyayangi penulis.
15. Kepada sahabat-sahabat yang sudah seperti saudariku, Intan Mira Novita, Lidya Kamelia, Dea Octav Melandani. Terima kasih sudah kebersamaan penulis sejak kita masih kecil hingga saat ini.
16. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Aliyah Zahra Fitri, Della Meisica, Nyoman Trilia Rahmasari, Andiani Puri Prastiwi, Aini Nurwala, Montestia Tabrani. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat suka maupun duka selama masa kuliah.
17. Kepada sahabatku Ardy Surya Sumirat, terima kasih selama ini menemani setiap langkah dan proses.

18. Kepada sahabatku Ketut Nadila Ariantini, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah disalurkan kepada penulis.
19. Kepada teman-teman KKN Kampung Bumiratu, Asmarani Putri Mahardini, Sherika Mardia, Feby Anggraini, Rizky Pradana Putra, Abdul Halim Bamazruk, Rafi Pradifa. Terima kasih.
20. Kepada teman-teman ilmu pemerintahan angkatan 2022, Terima kasih.
21. Kepada teman-teman UKM Hindu Unila angkatan 2022, Terima kasih.
22. Kepada Pegawai Badan Penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung khususnya bidang penguatan inovasi dan kebijakan strategis daerah dan sub bagian umum dan kepegawaian. Terima kasih atas dedikasi dan motivasi nya selama penulis magang hingga penelitian skripsi.
23. Kepada seluruh informan penelitian penulis, terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Terakhir, tidak lupa kuucapkan terima kasih kepada diriku sendiri yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tetapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah kuat dan tidak menyerah semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa aku mampu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi semua pihak.

Bandar Lampung,
Penulis

Ni Luh Mey Wedayani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi	17
2.1.1 Pengertian Implementasi	17
2.1.2 Model Implementasi.....	18
2.1.3 Implementasi dan Peran Strategis	20
2.2 Tinjauan Tentang Indeks Inovasi Daerah.....	22
2.2.1 Pengertian Inovasi Daerah	22
2.2.2 Indeks Inovasi Daerah.....	23
2.3 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Jenis Data.....	28
3.4.1 Data primer	28
3.4.2 Data sekunder.....	29
3.5 Informan Penelitian.....	29

3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.1 Observasi	30
3.6.2 Wawancara	31
3.6.2 Dokumentasi	31
3.7 Teknik Pengolahan Data	31
3.7.1 Editing	31
3.7.2 Interpretasi Data	32
3.8 Teknik Analisis Data	32
3.8.1 Reduksi Data	32
3.8.2 Penyajian Data	33
3.8.3 Penarikan Kesimpulan	33
3.9 Teknik Keabsahan Data	33
3.9.1 Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	34
3.9.2 Uji Keteralihan (<i>Transferability</i>)	34
IV. GAMBARAN UMUM	35
4.2 Sejarah Singkat Balitbangda Provinsi Lampung	35
4.2 Visi dan Misi Balitbangda Provinsi Lampung	36
4.3 Struktur Organisasi	37
4.4 Tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah	38
4.5 Sumber Daya Perangkat Daerah	46
4.6 Sarana Pendukung	48
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Hasil	51
5.2 Pembahasan	79
VI. SIMPULAN DAN SARAN	116
6.1 Kesimpulan	116
6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kategori Penilaian IID.....	3
Tabel 1. 2 Aspek Penilaian IID.....	4
Tabel 1. 3 Indikator Wajib SID.....	5
Tabel 1. 4 Perbandingan perubahan petunjuk teknis IID.....	6
Tabel 1. 5 Perbandingan visi/misi dan regulasi gubernur provinsi Lampung	8
Tabel 1. 6 Penelitian terdahulu	12
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	30
Tabel 4. 1 Data Pegawai Menurut Pendidikan	46
Tabel 4. 2 Data Pegawai Menurut Golongan.....	47
Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Pendukung Balitbangda.....	48
Tabel 5. 1 Data Pegawai Menurut Pendidikan	91
Tabel 5. 2 Data Pegawai Menurut Golongan.....	92
Tabel 5. 3 Rekap Absensi Sosialisasi IID	102
Tabel 5. 4 Keputusan predikat IID 2025.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung	38
Gambar 5. 1 sosialisasi pelaporan IID 2025	80
Gambar 5. 2 sosialisasi finalisasi dan validasi penginputan IID Tahun 2025	82
Gambar 5. 3 kegiatan Klinik Inovasi.....	85
Gambar 5. 4 kegiatan pendampingan klinik inovasi	87
Gambar 5. 5 tampilan perubahan juknis IID	89
Gambar 5. 6 Aplikasi/Website IID Balitbangda Kemendagri	97
Gambar 5. 7 Petunjuk Teknis IID 2025	106
Gambar 5. 8 Tata Aliran Pekerjaan IID 2025	109

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BALITBANGDA	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BSKDN	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
DRD	: Dewan Riset Daerah
IGA	: Innovative Government Award
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IID	: Indeks Inovasi Daerah
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MADANI	: Malang data Inovasi
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERKADA	: Peraturan Kepala Daerah
PPPK	: Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
SID	: Satuan Inovasi Daerah
SOP	: Standard Operating Procedure
SPD	: Satuan Pemerintahan Daerah
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inovasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja dan daya saing pemerintah daerah karena, melalui inovasi pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan solusi atas permasalahan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang mendefinisikan inovasi daerah sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan daerah. Peraturan ini bertujuan mendorong inisiatif inovasi dari berbagai pihak di daerah, seperti kepala perangkat daerah, ASN, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Regulasi ini dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai inovasi dan pembaruan kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 219), dimana perangkat daerah provinsi dibentuk untuk menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang salah satunya yaitu fungsi penelitian dan pengembangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung berfungsi sebagai unit kerja pemerintah provinsi yang memiliki tugas mendukung Gubernur dalam melaksanakan kewenangan di bidang riset dan pengembangan inovasi daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa Balitbangda bertanggung jawab membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan. Tugas tersebut meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, hingga evaluasi kebijakan daerah, baik melalui tugas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat, serta tugas lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) secara berkala mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Berdasarkan permendagri No 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, indeks inovasi merupakan seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur predikat indeks inovasi daerah pada periode tertentu. Indeks ini berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu menciptakan dan menerapkan inovasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan mekanisme penilaian atau alat ukur yang digunakan untuk menilai berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah berdasarkan indikator-indikator tertentu. Indeks ini kemudian dijadikan acuan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan *Innovative Government Award* (IGA).

Sistem penilaian IID yang diselenggarakan oleh Kemendagri Dalam BSKDN dilaksanakan secara terpadu melalui aplikasi berbasis daring/online. Aplikasi tersebut menjadi platform nasional untuk pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data inovasi daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Melalui sistem ini, setiap pemerintah daerah diwajibkan melaporkan seluruh inovasi yang telah dijalankan oleh perangkat daerahnya, disertai dengan

bukti dukung digital seperti dokumen, foto, video, maupun tautan pendukung lainnya. Penerapan sistem penilaian IID berbasis aplikasi daring bertujuan untuk mewujudkan proses penilaian inovasi daerah yang lebih transparan, efisien, dan terstandar secara nasional. Setiap inovasi yang dilaporkan melalui aplikasi akan dinilai berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, kemudian diverifikasi oleh tim penilai BSKDN.

Penilaian IID dilaksanakan dengan mengacu pada tiga bentuk inovasi daerah, yaitu, Inovasi tata kelola pemerintah daerah, Inovasi pelayanan publik, dan Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian ini tidak hanya melihat jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi juga menilai kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi terhadap masyarakat serta tata kelola pemerintahan daerah. Hasil dari keseluruhan penilaian tersebut menghasilkan skor atau nilai indeks yang mencerminkan tingkat inovasi suatu daerah. Pengukuran penilaian IID pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai bentuk inovasi. Berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kemendagri melalui BSKDN, hasil penilaian IID diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kategori Penilaian IID

Kategori	Rentang skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwasannya pengukuran penilaian IID di masukkan dalam 4 kriteria yaitu, Sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat capaian kinerja inovasi daerah dan menjadi dasar pemberian IGA setiap tahunnya. Untuk

mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Kemendagri melalui IID dan IGA menetapkan sejumlah aspek penilaian yang menjadi acuan. Penilaian ini terbagi ke dalam dua satuan utama, yaitu SPD dan SID, yang masing-masing memiliki variabel, indikator, bobot, dan skor maksimum tersendiri. Rincian aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. 2 Aspek Penilaian IID

Aspek	Variabel	Indikator	Bobot	Skor Maksimum
SPD (Satuan Pemerintahan Daerah)	3	15	25,20%	63
SID (Satuan Inovasi Daerah)	5	21	74,80%	187
Total	8	36	100%	250

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025

Pada tabel 1.2 dijelaskan bahwasannya penilaian IID atau IGA tahun 2025 dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu SPD dan SID. SPD dengan bobot 25,20% memiliki 3 variabel dan 15 indikator yang menilai kesiapan tata kelola pemerintahan, termasuk visi misi daerah, APBD, opini BPK, serta capaian pembangunan. SID dengan bobot 74,80% terdiri dari 5 variabel dan 21 indikator yang menilai implementasi inovasi. Secara keseluruhan terdapat 36 indikator yang relatif konsisten digunakan. Di dalam 2 aspek tersebut terdapat terdapat 5 indikator wajib (*mandatory*) yang menjadi aspek dominan dalam evaluasi Kemendagri setelah perangkat daerah melaporkan inovasinya sebagai penentu utama apakah suatu provinsi digolongkan sangat inovatif, inovatif, atau kurang inovatif. Berikut merupakan indikator-indikator dari SID.

Selain aspek penilaian dalam IGA, berikut indikator wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan SID. Adapun indikator wajib SID tahun 2025 yaitu:

Tabel 1. 3 Indikator Wajib SID

No	Indikator	Definisi operasional
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah
2.	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah (dalam dua tahun terakhir)
3.	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.
4.	Kemanfaatan inovasi	Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)
5.	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025.

Pada tabel 1.2 dijelaskannya bahwa Kelima indikator tersebut dikategorikan sebagai indikator wajib Dalam penilaian IID atau IGA. Indikator wajib harus dilaporkan karena menjadi dasar utama penilaian. Apabila indikator wajib tidak dipenuhi, maka nilai yang diperoleh akan nol dan berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir IID. Dengan adanya kerangka pengukuran yang sistematis, IID tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja inovasi, tetapi juga sebagai dorongan agar pemerintah daerah terus melakukan pembaharuan, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan inovasi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui implementasi SID, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang memenuhi kriteria kebaruan, kemanfaatan, keberlanjutan, dan kemudahan replikasi.

Implementasi inovasi daerah masih menghadapi 5 kendala teknis maupun non-teknis yaitu: pertama, petunjuk teknis (juknis) penilaian IID sering berubah setiap tahun, sehingga perangkat daerah kesulitan menyesuaikan format pelaporan inovasi.

Tabel 1. 4 Perbandingan perubahan petunjuk teknis IID

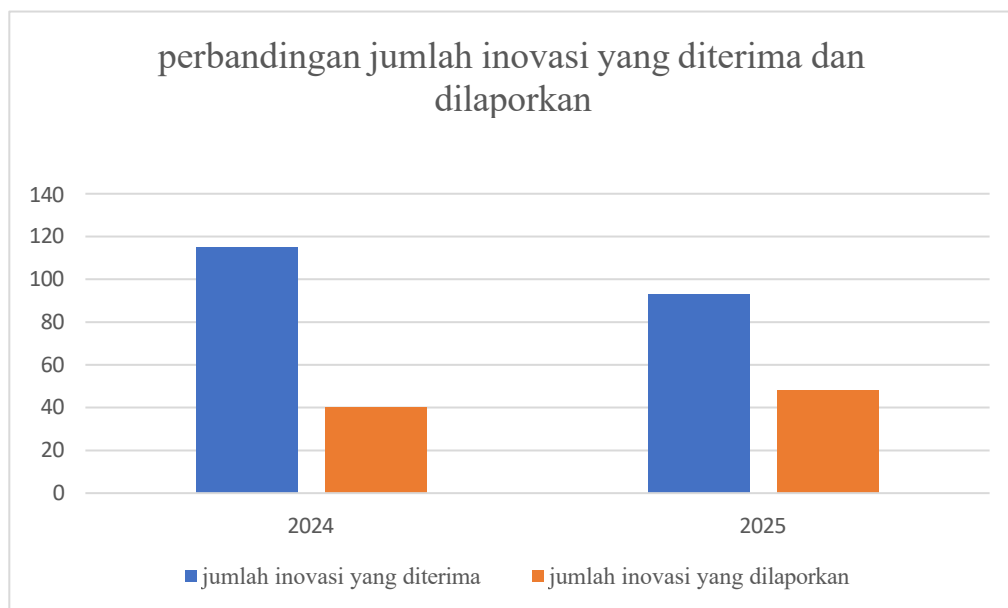
Tahun	Sangat inovatif	Inovatif	Kurang inovatif
2024	60,01-100	35-60	0-34,99
2025	65,01-100	40-65	0-40

Sumber: Bahan Teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) dikelola oleh peneliti 2025.

Pada tabel 1.4 di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat peningkatan standar penilaian dan kompleksitas dalam mekanisme pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah IID dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan ambang batas skor pada kategori penilaian IID menunjukkan adanya pengetatan penilaian yang menuntut daerah untuk menghasilkan inovasi yang lebih berkualitas dan berdampak nyata. Perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi perangkat daerah, terutama dalam hal penyesuaian terhadap format pelaporan yang semakin rinci dan jadwal penginputan data yang lebih ketat. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan data inovasi dan keterlambatan dalam proses validasi, sehingga berdampak pada rendahnya capaian nilai IID. Dengan demikian, perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun menjadi faktor penghambat implementasi inovasi di tingkat daerah ketika kapasitas adaptasi birokrasi belum sepenuhnya siap.

Kedua, masih banyak inovasi yang tidak memiliki bukti dukung lengkap, sehingga meskipun inovasi sudah berjalan, nilainya rendah dalam penilaian IID.

Gambar 1. 1 Perbandingan jumlah inovasi yang diterima dan dilaporkan



Sumber: Laporan hasil input OPD Inovasi daerah provinsi Lampung tahun 2024-2025 dikelola oleh peneliti 2025

Pada gambar 1.1 Grafik tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam kinerja pengelolaan inovasi daerah antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, jumlah inovasi yang diterima oleh Balitbangda Provinsi Lampung tercatat sebanyak 115 inovasi, namun yang berhasil dilaporkan ke BSKDN hanya sebanyak 40 inovasi. Sementara pada tahun 2025, jumlah inovasi yang diterima Balitbangda dari OPD Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 93 inovasi, dan yang dapat dilaporkan ke BSKDN hanya 48 inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pelaporan inovasi daerah, terutama terkait kelengkapan bukti dukung yang menjadi syarat utama dalam penilaian IID. Banyak inovasi yang tidak dapat dilaporkan karena belum memenuhi dokumen pendukung yang diperlukan, seperti SK penetapan, dokumentasi kegiatan, hasil uji coba, atau bukti implementasi di lapangan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada OPD agar setiap inovasi yang dihasilkan dapat terdokumentasi dengan baik dan memenuhi kriteria administratif maupun substantif sesuai ketentuan BSKDN.

Ketiga, komitmen pimpinan daerah dalam mendorong inovasi belum sepenuhnya optimal beberapa pimpinan OPD masih menganggap inovasi sekadar kewajiban administratif, bukan kebutuhan strategis.

Tabel 1. 5 Perbandingan visi/misi dan regulasi gubernur provinsi Lampung

Tahun	Pimpinan daerah	Visi/misi dan regulasi	Analisis permasalahan
2024	Gubernur Arinal Djunaidi	Tidak terdapat muatan visi atau misi atau regulasi yang menekankan pentingnya pengembangan inovasi daerah	Lemahnya komitmen pimpinan daerah berdampak pada rendahnya kesadaran OPD inovasi dianggap cenderung kewajiban administratif semata.
2025	Gubernur Rahmat Mirzani Djausal	Tidak terdapat visi maupun misi yang menyinggung penguatan inovasi daerah	Rendahnya arah kebijakan inovasi menyebabkan perangkat daerah kurang terdorong untuk mengintegrasikan inovasi dalam kinerja.

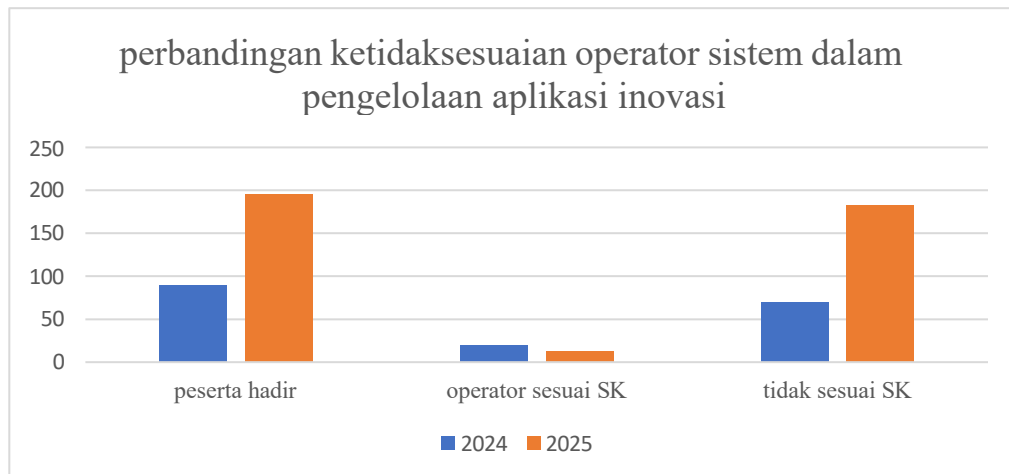
Sumber: Visi dan Misi Gubernur provinsi lampung dikelola oleh peneliti 2025.

Pada tabel 1.5, terlihat bahwa baik pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi maupun pada tahun 2025 di bawah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, belum terdapat visi, misi, ataupun regulasi yang secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan inovasi daerah. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan inovasi daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi dan komitmen pimpinan yang kuat. Belum adanya kebijakan kepala daerah yang secara eksplisit mengatur dan mendorong inovasi menyebabkan inovasi daerah masih dipahami sebagai kewajiban administratif dalam penilaian IID, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan inovasi daerah perlu dianalisis melalui pendekatan kelembagaan, khususnya terkait peran organisasi,

kewenangan, dan komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah.

Keempat, pada aspek teknis, sering terjadi pergantian operator sistem yang mengelola aplikasi inovasi, sehingga kontinuitas dan kualitas input data terganggu.

Gambar 1. 2 Perbandingan ketidaksesuaian operator sistem



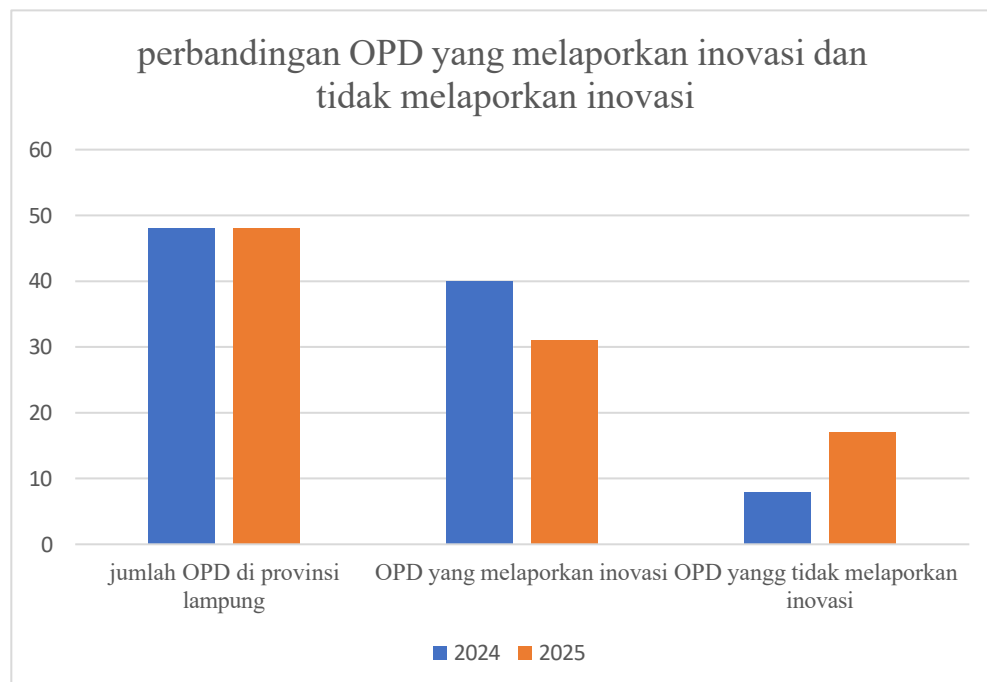
Sumber: Rekapitulasi kehadiran bimtek aplikasi inovasi dan dokumen SK operator inovasi daerah provinsi Lampung tahun 2024-2025 dikelola oleh peneliti 2025.

Pada gambar 1.2 Grafik tersebut menunjukkan perbandingan ketidaksesuaian operator sistem dalam pengelolaan aplikasi inovasi antara tahun 2024 dan 2025. Terlihat bahwa pada tahun 2025 jumlah peserta hadir meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024, menandakan adanya peningkatan partisipasi dalam kegiatan pengelolaan inovasi. Namun, jumlah operator yang ditetapkan melalui SK masih relatif sedikit, dan lebih mengkhawatirkan lagi, proporsi operator yang tidak sesuai SK meningkat tajam pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kelembagaan, permasalahan inovasi daerah juga perlu dilihat melalui pendekatan sistem. Dari perspektif sumber daya manusia, pelaksanaan inovasi daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dan ketidakonsistenan SDM pengelola inovasi. Pergantian operator aplikasi inovasi yang cukup sering serta ketidaksesuaian antara operator yang ditetapkan

dalam SK dengan pelaksana aktual berdampak pada rendahnya kontinuitas dan kualitas pengelolaan data inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan SDM menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas implementasi SID di Provinsi Lampung.

Kelima, masih ada perangkat daerah yang enggan menginput data inovasi karena merasa inovasi tidak memberikan manfaat langsung bagi unit kerjanya.

Gambar 1. 3 perbandingan OPD di Provinsi Lampung



Sumber: Laporan hasil input OPD inovasi daerah provinsi Lampung tahun 2024-2025 dikelola oleh peneliti tahun 2025.

Pada gambar 1.3 Grafik tersebut memperlihatkan perbandingan antara jumlah OPD yang melaporkan dan yang tidak melaporkan inovasi pada tahun 2024 dan 2025 di Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, dari total 48 OPD, sebanyak 40 OPD telah melaporkan inovasi, sedangkan 8 OPD belum melakukannya. Namun, pada tahun 2025, jumlah OPD yang melaporkan inovasi menurun menjadi 31 OPD, sementara 17 OPD tidak menyampaikan laporan inovasi. Penurunan ini menunjukkan adanya penyusutan tingkat partisipasi OPD dalam pelaporan inovasi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

rendahnya pemahaman mengenai urgensi pelaporan inovasi daerah, keterbatasan pendampingan teknis, serta kurangnya komitmen dari pimpinan OPD. Akibatnya, masih ada perangkat daerah yang enggan melakukan input data inovasi karena menganggap inovasi belum memberikan dampak langsung bagi unit kerjanya, sehingga pelaporan inovasi belum menjadi bagian dari budaya kerja yang melekat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

5 Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi capaian 5 indikator wajib SID sebagai skala pengukuran kinerja inovasi daerah. Keterkaitan antara kondisi empiris dan indikator teknis ini menegaskan bahwa peningkatan nilai IID tidak hanya bergantung pada jumlah inovasi yang dilaporkan, tetapi juga pada kualitas inovasi dalam implementasi SID untuk memenuhi seluruh aspek penilaian yang telah ditetapkan. Maka, penguatan aspek SID melalui perbaikan komunikasi, optimalisasi sumber daya, peningkatan komitmen pelaksana, dan penyempurnaan struktur birokrasi menjadi langkah strategis yang mendesak agar Provinsi Lampung dapat mencapai kategori “Sangat Inovatif” secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji SID dalam peningkatan IID di Provinsi Lampung tahun 2025. Mengingat SID memiliki bobot penilaian yang dominan, pelaksanaannya menjadi faktor utama yang menentukan predikat inovasi suatu daerah. Namun, dalam implementasi SID masih terdapat 5 permasalahan yang berpotensi menurunkan capaian IID di masa mendatang. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas implementasi tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana implementasi SID yang dijalankan oleh Balitbangda Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan IID.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Penelitian terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
(Septiya, 2023)	Analisis program inovasi daerah pada pemerintah daerah provinsi lampung	penelitian ini berfokus pada analisis jenis-jenis inovasi yang diajukan oleh pemerintah daerah provinsi lampung dan tantangan yang dihadapi dalam pengusulan program inovasi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan banyak inovasi daerah di provinsi lampung tidak diterima atau dinilai bukan inovasi oleh kementrian dalam negeri.
(Febianto, 2023)	Strategi badan penelitian dan pengembangan daerah dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah (studi kasus di provinsi lampung tahun 2022)	penelitian ini mengkaji bagaimana peran dan strategi balitbangda provinsi lampung dalam mendorong penciptaan inovasi yang memenuhi standar kementrian dalam negeri khususnya dalam upaya peningkatan nilai indeks inovasi daerah. Keberhasilan strategi balitbangda lampung dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah paling menonjol pada strategi program, sementara dalam sumber daya pendukung masih perlu optimalisasi.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
(Fitriati & Putra, 2023)	Tata kelola strategik peningkatan inovasi daerah (studi pada pemerintah kota Palembang tahun 2020-2022)	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang berhasil keluar dari kondisi stagnasi inovasi pada tahun 2018 dan mampu menjadi salah satu kota terinovatif di Indonesia pada periode 2020-2022. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan lima tahapan strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu: <i>purpose</i> (tujuan), <i>environment</i> (lingkungan), <i>direction</i> (pengarahan), <i>action</i> (tindakan), dan <i>learning</i> (pembelajaran/evaluasi). Melalui tahapan ini, Pemkot Palembang dengan dukungan Bappeda Litbang berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam mendorong inovasi di setiap perangkat daerah (OPD) serta masyarakat.</p>
(Haira Zulfia dkk., 2023)	Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Kinerja Organisasi pada Pemerintah Kota Padang	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah di Kota Padang melalui Perwako No. 60 Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi kurangnya dukungan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia yang inovatif, serta kurangnya komitmen dari pimpinan dan stakeholder terkait Pelaksanaan inovasi.</p>

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
(Rosyad dkk., 2023)	Efektivitas pengelolaan data melalui aplikasi malang data inovasi dalam meningkatkan indeks inovasi daerah pada innovative government award (studi pada badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten malang)	penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan data inovasi daerah kabupaten malang melalui aplikasi malang data inovasi (MADANI) dalam meningkatkan indeks inovasi daerah pada innovative government award (IGA). Kabupaten malang menghadapi penurunan indeks inovasi dalam beberapa tahun terakhir, balitbangda kabupaten malang mengembangkan aplikasi madani sebagai solusi untuk mengelola data inovasi daerah secara lebih efektif dan terintegrasi sebelum diinput ke aplikasi pusat IGA. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi madani cukup efektif dalam mengelola data inovasi yang kemudian berkontribusi pada peningkatan indeks inovasi daerah kabupaten malang sebesar 4,63 poin.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 1.4 di atas, terdapat persamaan dan perbedaan di dalam penelitian ini. Beberapa persamaan khususnya dari aspek metodologi dan tema besar yang diangkat. Mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif dan mengangkat topik yang berkaitan dengan inovasi daerah, baik dari segi strategi, pelaksanaan program, maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan inovasi. Penelitian-penelitian tersebut juga sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah atau lembaga teknis seperti balitbangda dalam mendorong inovasi dan peningkatan indeks inovasi daerah.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji Implementasi Satuan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025), padahal aspek ini memiliki bobot paling dominan (74,80%) dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang strategis untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi baru dalam literatur inovasi sektor publik di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah "Bagaimana implementasi satuan inovasi daerah (SID) Dalam peningkatan indeks inovasi daerah (IID) di badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis implementasi satuan inovasi daerah (SID) Dalam peningkatan indeks inovasi daerah (IID) di badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan inovasi daerah. Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman dari mata kuliah Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik melalui penerapan model implementasi George C. Edwards III dalam konteks peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada kajian Pemerintahan Daerah dan Ekologi Pemerintahan,

karena membahas dinamika peran pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi. Dari perspektif Pelayanan Sektor Publik serta Tata Kelola SDM Pemerintahan, penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dengan Perencanaan Pembangunan, sebab menunjukkan bahwa inovasi dapat dijadikan instrumen strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam mengevaluasi keberhasilan dan kendala implementasi Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID). Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pimpinan dan staf Balitbangda dalam menyusun strategi penguatan inovasi yang lebih efektif, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mendukung kebijakan internal Balitbangda agar lebih berorientasi pada pencapaian predikat daerah inovatif yang berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu konsep dengan cakupan makna yang luas. Tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan *execution* suatu program atau kegiatan, melainkan juga mencakup berbagai faktor yang memengaruhi prosesnya, hasil yang dicapai, serta manfaat yang diperoleh. Lebih jauh, implementasi berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan yang lebih besar dan menyeluruh sebagai bagian integral dari tujuan organisasi secara keseluruhan (Jumroh, 2021 hlm.1)

Jumroh (2021, hlm. 49) Menjelaskan Konsep implementasi merupakan bagian dari konsep kebijakan, sehingga untuk memahaminya secara menyeluruh diperlukan pemahaman mengenai sistem kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan siklus kebijakan. Implementasi sendiri merupakan salah satu tahap dalam sistem kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan. Tahapan ini biasanya ditempatkan setelah proses perencanaan atau perumusan kebijakan, yaitu saat kebijakan yang telah dirancang mulai diwujudkan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kebijakan, harus tercantum tata cara yang mengatur bagaimana proses implementasi dijalankan. Dengan demikian, bukan hanya tujuan akhir yang penting, tetapi juga

prosedur maupun mekanisme SOP yang tercantum dalam kebijakan memiliki peranan yang sama pentingnya.

Implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan atau pelaksanaan. Istilah ini, sebagai kata kerja, kerap digunakan dalam konteks penelitian ilmiah (Pramono, 2020 hlm.1). Umumnya, implementasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau instansi guna mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kata kerja mengimplementasikan pada dasarnya erat kaitannya dengan kata benda kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan upaya agar suatu kebijakan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua alternatif langkah yang dapat ditempuh, yakni langsung diwujudkan melalui program-program konkret atau melalui penyusunan kebijakan turunan derivatif dari kebijakan utama tersebut.

Jika dikaitkan dengan kebijakan, implementasi bermakna bahwa sebuah kebijakan tidak cukup hanya dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk formal seperti undang-undang, lalu dibiarkan tanpa pelaksanaan. Sebaliknya, kebijakan harus dijalankan agar dapat memberikan dampak serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan tertentu melalui berbagai instrumen yang tersedia dan dalam rentang waktu yang teratur.

2.1.2 Model Implementasi

Model implementasi adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dari tahap perumusan hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Model ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya model

implementasi, peneliti dapat menganalisis keterkaitan antara kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Model implementasi juga berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi variabel penting yang berperan dalam proses kebijakan. Melalui model ini, implementasi kebijakan dapat dipahami secara lebih sistematis, terarah, dan mudah dievaluasi.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III 1980 dalam buku Subianto (2020, hlm. 70), berangkat dari sebuah pertanyaan mengenai syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Edwards III mengidentifikasi empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi *communication*, sumber daya *resources*, sikap/disposisi *dispositions/attitudes*, serta struktur birokrasi *bureaucratic structure*.

Keempat faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan dan harus berjalan secara bersamaan karena saling berkaitan. Dengan demikian, teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek penting karena suatu kebijakan hanya dapat diimplementasikan dengan baik apabila informasi yang diterima pelaksana jelas. Hal ini mencakup proses penyampaian informasi *transmisi*, kejelasan pesan *clarity*, serta konsistensi dari informasi yang disampaikan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya meliputi empat komponen utama, yaitu: ketersediaan staf yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas, informasi yang dibutuhkan untuk mendukung

pengambilan keputusan, kewenangan *authority* yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam konteks ini, peran utama ada pada aparat birokrasi sebagai implementor yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan secara efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup keberadaan *Standard Operating Procedures* (SOP), mekanisme alur kerja, dan tata pelaksanaan program. Tanpa adanya prosedur baku, implementasi akan sulit mencapai hasil optimal karena penyelesaian masalah cenderung bersifat *ad-hoc*. Oleh karena itu, fragmentasi dalam organisasi perlu dihindari dan diatasi dengan sistem koordinasi yang baik.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara bersamaan agar implementasi berjalan efektif. Dengan adanya kejelasan komunikasi, dukungan sumber daya yang memadai, sikap positif dari pelaksana, serta struktur birokrasi yang tertata, maka implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.3 Implementasi dan Peran Strategis

Menurut Paroli (2023, hlm. 7), Manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni sekaligus ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi *cross functional* yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fokus utama manajemen strategi adalah mengintegrasikan berbagai bidang seperti manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer demi keberhasilan organisasi. Selain itu, manajemen strategi juga dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan serta pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mewujudkan sasaran perusahaan.

Menurut Jumroh (2021, hlm. 9), Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan berkelanjutan yang berlangsung dalam lingkungan yang dinamis dan selalu berubah, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima kebijakan. Strategi sendiri dipahami sebagai konsep yang lebih operasional dibandingkan visi yang bersifat umum dan berjangka panjang. Dari strategi inilah kemudian lahir langkah-langkah aksi yang bersifat lebih teknis dan rinci. Setiap elemen tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing yang tidak boleh disamakan, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses implementasi.

Implementasi mempunyai peran strategis karena dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun pemerintah daerah. Nilai tambah tersebut tercermin ketika kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya berhenti pada pencapaian administratif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata berupa peningkatan kinerja. Selain itu, implementasi juga mendorong lahirnya inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan SID sangat penting karena memengaruhi secara langsung capaian IID. Mengingat IID memiliki bobot penilaian terbesar dalam IGA, keberhasilan implementasi SID menjadi faktor utama bagi suatu daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan predikat inovatifnya.

2.2 Tinjauan Tentang Indeks Inovasi Daerah

2.2.1 Pengertian Inovasi Daerah

Inovasi berasal dari kata *innovation* yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya *innova* yang artinya memperbaharui dan mengubah (Ausat dkk., 2023 hlm 1). Inovasi dapat dimaknai sebagai suatu pembaruan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, inovasi merupakan pendekatan atau metode baru yang mencakup keseluruhan proses, mulai dari input hingga output, sehingga mampu menghasilkan perubahan nyata dan berhasil memberikan dampak positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Menurut Ausat dkk., (2023, hlm. 29), Inovasi didefinisikan sebagai sebuah ide atau praktik yang dianggap baru oleh unit adopsi yang relevan. Artinya, inovasi tidak harus benar-benar baru secara absolut, melainkan bisa saja sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi dipersepsikan sebagai hal yang baru oleh individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Inovasi juga dipahami sebagai suatu gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu maupun kelompok, yang kemudian diadopsi dan disebarkan melalui proses komunikasi dalam suatu sistem sosial. Dengan kata lain, inovasi tidak hanya mencakup penciptaan ide atau produk baru, tetapi juga proses penerimaan serta pemanfaatannya oleh masyarakat atau kelompok tertentu

Inovasi daerah merupakan upaya pembaruan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih baik, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pada dasarnya, inovasi daerah tidak selalu berarti sesuatu yang benar-benar baru, melainkan

bisa berupa praktik yang sudah ada namun dipersepsikan baru oleh masyarakat atau organisasi tertentu. Proses adopsi dan penerimaan inovasi oleh masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, inovasi daerah berperan penting dalam mendorong peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

2.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Pada pelaksanaannya yang tercantum dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, 2017) Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai bentuk pembaruan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Aturan ini menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola, pelayanan publik, serta bidang lain sesuai kewenangan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Proses inovasi dimulai dari pengajuan gagasan, pelaksanaan uji coba, evaluasi, hingga penerapan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, inovasi harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri juga melakukan penilaian dan memberikan apresiasi untuk mendorong kreativitas serta motivasi pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi.

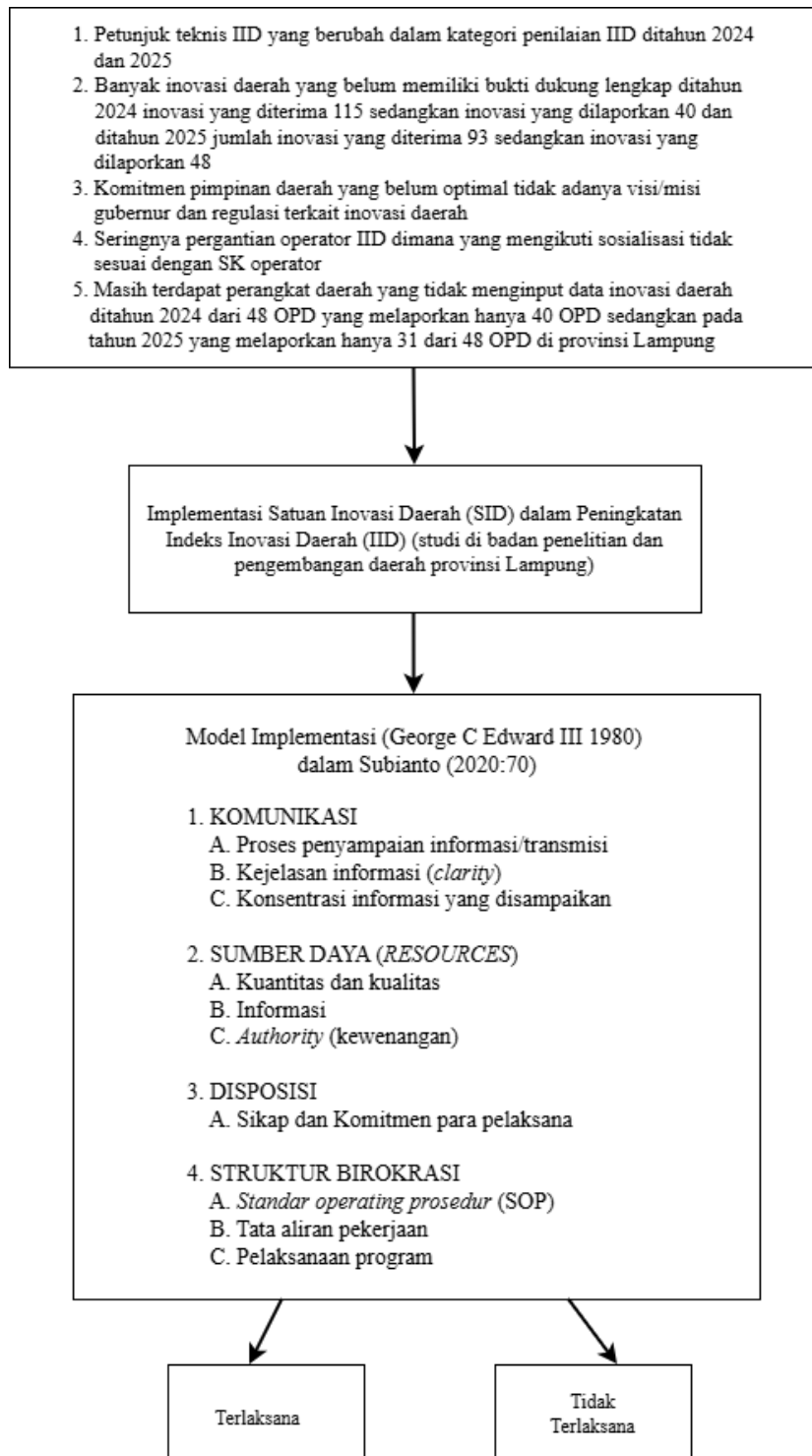
IID merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menjadi salah satu acuan dalam menilai kinerja kepala daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan maupun evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut kementerian dalam negeri (kemendagri), indeks inovasi daerah disusun untuk mendorong terciptanya iklim

inovasi dalam pemerintahan daerah serta sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah sebagaimana yang dikutip dalam (Kementrian dalam Negeri Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri, 2025).

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mendapat mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Kemendagri Tahun 2025. Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mendorong serta memotivasi pemerintah daerah agar terus mengembangkan kreativitas dan menerapkan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi pembinaannya, BKSDN senantiasa lahirnya ide serta gagasan baru berupa inisiatif inovasi di tingkat daerah. Inisiatif tersebut kemudian diuji coba hingga mencapai keberhasilan, yang selanjutnya dapat diimplementasikan secara resmi melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada).

Indeks Inovasi Daerah (IID) ini diselenggarakan sebagai penguat sistem inovasi yang dilaksanakan pemerintah supaya tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi juga dapat diukur, dievaluasi, dan dikembangkan. Melalui IID, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam merancang program, kebijakan, maupun layanan publik agar dapat meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, IID menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja kepala daerah sekaligus bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan inovasi. Dengan demikian, IID mendorong inovasi agar tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diukur, dipantau, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 2), Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu, dengan data tersebut dimanfaatkan dalam pemecahan masalah yang diteliti. Metode ini mencakup beragam prosedur dan teknik yang diterapkan peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran data secara teratur dan rasional, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan pada kondisi tertentu dari sudut pandang peneliti. Penggunaan metode kualitatif dipilih karena mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasikan satuan inovasi daerah (SID) dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dijalankan balitbangda provinsi lampung tahun 2025.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Balitbangda terdapat fenomena, permasalahan, dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Inovasi Daerah. Selain itu, lokasi penelitian ini juga merupakan tempat penulis melaksanakan kegiatan magang MBKM, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk mengamati dan mengidentifikasi fenomena yang ada secara langsung. Fenomena yang ditemukan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat tema penelitian mengenai Implementasi Satuan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan yang digunakan peneliti untuk mempermudah dalam mengarahkan kajian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada Implementasi Satuan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Studi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025) dengan batasan kajian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung sebagai instansi utama yang berperan dalam pengelolaan inovasi daerah. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada lima permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan SID, yaitu perubahan petunjuk teknis IID yang terjadi hampir setiap tahun, rendahnya kelengkapan bukti dukung inovasi daerah, lemahnya komitmen pimpinan daerah dalam mendorong inovasi, ketidakkonsistenan penugasan operator pengelola aplikasi inovasi daerah, serta rendahnya partisipasi perangkat daerah

dalam pelaporan inovasi. Kelima permasalahan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Subianto (2020, hlm. 70). Sebagai pisau analisis, yang menekankan pada empat Indikator utama, yaitu:

1. Komunikasi
 - A. proses penyampaian informasi/transmisi
 - B. Kejelasan informasi (*clarity*)
 - C. konsentrasi informasi yang disampaikan
2. Sumber Daya (*Resources*)
 - A. Kuantitas dan Kualitas
 - B. Informasi
 - C. *Authority* (kewenangan)
3. Disposisi
 - A. sikap dan komitmen para pelaksana
4. Struktur Birokrasi
 - A. *Standar operating prosedur* (SOP)
 - B. Tata aliran pekerjaan
 - C. Pelaksanaan program

Analisis difokuskan untuk melihat bagaimana keempat indikator implementasi tersebut mempengaruhi implementasi pelaksanaan terkait 5 indikator wajib (*mandatory*) yaitu, regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM, kecepatan penciptaan, kemanfaatan, dan kualitas inovasi. Dengan demikian, teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi.

3.4 Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data primer

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 71), Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara dan

observasi terhadap informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi.

3.4.2 Data sekunder

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 71), Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen dan arsip resmi yang berkaitan dengan penelitian. Data ini meliputi gambaran umum mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, laporan capaian Indeks Inovasi Daerah tahun-tahun sebelumnya, dokumen perencanaan strategis, serta regulasi terkait inovasi daerah.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 62), Informan adalah individu Informan yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga data yang diperoleh relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian. Informan ini biasanya adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti dan memiliki kemampuan untuk berbicara, bertukar pikiran, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang dipelajari.

Pertimbangan dalam penggunaan teknik ini adalah karena informan yang dipilih dianggap memiliki peran strategis, pemahaman, serta keterlibatan langsung implementasi satuan inovasi daerah (SID) dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2025. Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Peran
1.	Yurnalis	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2.	Tommy Efra Handarta	Kepala Bidang Penguatan Inovasi Dan Kebijakan Strategis Daerah Balitbangda Provinsi Lampung
3.	Shinta Fitriana	Kepala Tim Kerja Bidang Penguatan Inovasi Dan Kebijakan Strategis Daerah Balitbangda Provinsi Lampung
4.	Sapitri Anggita Putri	Operator Inovasi Daerah Dinas Pertanian
5.	Deden Hermawan	Operator Inovasi Daerah Dinas Pendidikan
6.	Aria Evrianda	Operator Inovasi Daerah Dinas Kesehatan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Hardani dkk. (2020, hlm. 123), Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan aktivitas yang berlangsung. Jenisnya terbagi menjadi tiga: partisipatif, terbuka/terus terang, dan tidak terstruktur. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lingkungan, aktivitas, serta proses kerja yang berlangsung di Balitbangda Provinsi Lampung. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang mendukung maupun menghambat. Kemudian hasil observasi digunakan sebagai

data pelengkap untuk memperkuat temuan dari wawancara dan dokumentasi.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 137), Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan informan, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. wawancara memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, maupun persepsi informan mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen, arsip, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari laporan resmi, peraturan, media cetak maupun daring, serta dokumen internal Balitbangda. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan mencakup laporan capaian Indeks Inovasi Daerah, dokumen perencanaan strategis, regulasi terkait Inovasi Daerah, serta arsip kegiatan Balitbangda yang mendukung penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif setelah data lapangan berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Proses ini dilakukan melalui beberapa teknik pengolahan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

3.7.1 Editing

Dalam tahap editing, peneliti menelaah kembali seluruh data hasil wawancara dengan cara mencocokkannya dengan pedoman wawancara

yang telah disusun sebelumnya. Data tersebut kemudian diseleksi dan diklasifikasikan untuk memastikan hanya informasi yang relevan dan mendukung fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan. Sementara itu, data hasil observasi diolah dengan mengumpulkan dan merangkum temuan-temuan penting yang berkaitan dengan strategi Balitbangda berdasarkan hasil pengamatan langsung, sehingga data dapat disajikan secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami.

3.7.2 Interpretasi Data

Data Pada tahap interpretasi data, peneliti menafsirkan data penelitian yang telah disajikan dalam bentuk uraian naratif maupun tabel guna memperoleh makna dan menarik kesimpulan sebagai temuan penelitian. Proses penafsiran dilakukan secara hati-hati, terutama terhadap data yang bersumber dari informasi atau pengalaman informan yang bersifat sensitif, dengan menggunakan pilihan kata yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif atau merugikan pihak tertentu. Seluruh hasil penelitian kemudian disusun dan dipaparkan secara sistematis pada bagian lampiran, dengan tetap menjaga keterkaitannya dengan fokus dan temuan utama penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Rahmadi (2011, hlm. 92), Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan hingga seluruh proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis interaktif model miles and huberman. Analisis dilakukan secara terus-menerus dengan berinteraksi langsung dengan informan maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.8.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menyeleksi, merangkum, dan memfokuskan data

yang diperoleh dari catatan lapangan. Pada tahap ini, data mentah diolah dengan mengelompokkan informasi yang sejenis serta menyisihkan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk mempertajam analisis dan memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola penting, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menata informasi penelitian secara terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh tabel, bagan, atau pemetaan hubungan antar kategori, sehingga peneliti dapat melihat pola, kecenderungan, serta dasar yang jelas dalam menarik kesimpulan.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data kualitatif yang dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak bersifat mutlak sejak awal, melainkan sementara dan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan baru dapat dikatakan sah apabila telah diverifikasi secara berulang melalui pengecekan catatan lapangan, melakukan triangulasi sumber maupun metode, serta membandingkan data dengan teori yang digunakan. Proses ini bertujuan agar hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 270), Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan teknik uji validitas agar hasil

penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

3.9.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan tingkat kebenaran data yang diperoleh di lapangan. kredibilitas data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan sejawat, serta triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memverifikasinya dengan berbagai sumber informan yang terlibat dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Dengan demikian data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

3.9.2 Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain. keteralihan dicapai dengan menyajikan deskripsi penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan kontekstual, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan baik dan menentukan apakah hasil tersebut bisa diaplikasikan di tempat lain lalu dijabarkan secara mendetail agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi SID dalam peningkatan IID di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III pada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi SID telah terlaksana pada indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dan dalam indikator disposisi belum terlaksana. kondisi ini disebabkan oleh belum kuatnya sikap dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong inovasi daerah.

Lemahnya disposisi pelaksana tercermin dari belum adanya visi, misi, dan regulasi pimpinan daerah yang menempatkan inovasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Akibatnya, inovasi daerah masih dipersepsikan sebagai kewajiban administratif dalam rangka pemenuhan penilaian IID, bukan sebagai kebutuhan strategis organisasi. Selain itu, belum optimalnya peran pimpinan daerah dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan inovasi menyebabkan rendahnya partisipasi OPD. Dengan demikian, lemahnya indikator disposisi menjadi faktor utama yang menghambat implementasi SID dan berkontribusi terhadap belum terlaksana nya capaian IID Provinsi Lampung Tahun 2025.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dari indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sudah terlaksana namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar mampu mendukung pelaksanaan inovasi daerah yang lebih baik. Upaya perbaikan pada indikator komunikasi dapat dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan setiap terjadi perubahan petunjuk teknis IID agar pemahaman OPD lebih merata. Pada indikator sumber daya, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penetapan operator inovasi yang stabil dan didukung pelatihan teknis secara berkelanjutan. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, perbaikan dapat dilakukan dengan memastikan penerapan SOP pelaksanaan IID secara konsisten, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kualitas dan kelengkapan bukti dukung inovasi daerah. Upaya perbaikan secara terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan tuntutan peningkatan kualitas IID.
2. Pada Indikator disposisi menjadi faktor penghambat implementasi SID, maka rekomendasi utama yang perlu dilakukan adalah penguatan komitmen dan sikap pimpinan daerah terhadap inovasi daerah. Pimpinan daerah perlu menetapkan kebijakan strategis yang secara tegas menempatkan inovasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui integrasi inovasi dalam visi dan misi daerah serta penyusunan regulasi pimpinan daerah yang mengikat seluruh OPD. Penegasan arah kebijakan tersebut penting untuk memberikan legitimasi dan kepastian kelembagaan bagi pelaksanaan inovasi daerah, sehingga inovasi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif dalam penilaian IID, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas inovasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausat, A. M. A., Setyasari, U. E., Amane, A. P. O., Mian, A. S., Nurbaeti, E., Gadzali, S. S., Azzaakiyyah, H. K., Irwanto, A. S., Harto, B., & Mulyanto, M. F. (2023). Inovasi: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif (Issue February).
- Febianto. (2023). Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Lampung Tahun 2022). [https://Digilib.Unila.Ac.Id/74014/3/Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.Pdf](https://Digilib.Unila.Ac.Id/74014/3/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan.Pdf)
- Fitriati, R., & Putra, M. G. (2023). Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang. *Journal Of Governance Innovation*, 5(2), 308–326. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3190>
- Haira Zulfia, I., Endrawan, G., Rosika, C., Syamsi, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(Vol. 14 No. 2, Juni 2023), 171–184. <https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V14i2.6666>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A. F., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Isbn: 978-623-7066-33-0. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Jumroh, H. . P. J. . (2021). Implementasi Pelayanan Publik_Teori Dan Praktik. In *Insan Cendekia Mandiri*.
- Kementrian Dalam Negeri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2025). Pedoman Umum 2025 Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (Iga) Dan Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi

Daerah (Iid).

Noviyanti, W., Humaydiy, A. A., & Duriyat, M. (2025). Tofedu : The Future Of Education Journal. 4(5), 1212–1221.

Nuranis. (2022). Analisis Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiarni , Indonesia. 2(6), 627–639.

Paroli. (2023). Manajemen Strategi: Vol. I (Issue November).

Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical (Vol. 44, Issue 8). [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, (2017). <https://doi.org/10.4324/9781351174824-18>

Rosyad, M. N., Ati, N. U., & Putra, L. R. (2023). Efektivitas Pengelolaan Data Melalui Aplikasi Malang Data Inovasi Dalam Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Pada Inovative Government Award. Jurnal Respon Publik, 17(6), 96–105.

Septiya. (2023). Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah Di Provinsi Lampung. 68. [http://digilib.unila.ac.id/70776/3/Skripsi Tanpa Pembahasan.Pdf](http://digilib.unila.ac.id/70776/3/Skripsi%20Tanpa%20Pembahasan.Pdf)

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi. In Brilliant An Imprint Of Mic Publishing Copyright.

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.

Zikri, M. S., Ilmu, J., Publik, A., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk) Volume 3 , Nomor 2 , Desember 2023 Issn 2807-6729 Penggunaan Internet Di Lingkungan Pemerintahan. 3, 1–9.